

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki Otonomi Daerah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Serta Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Misi utama Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bukan hanya melimpahkan kewenangan pembangunan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah efisiensi dan efektivitas sumber daya keuangan.

Sehubungan dengan banyaknya perubahan di bidang ekonomi, sosial dan politik dalam era reformasi ini, berdampak pada percepatan perubahan perilaku masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tuntutan masyarakat akan adanya transparansi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, demokratisasi dalam pengambilan keputusan, pemberian pelayanan oleh pemerintah yang lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat dan penerapan hukum secara konsekuen. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan. Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi melalui dana perimbangan. Namun tidak berarti jika kemandirian keuangan daerah tinggi, maka daerah sudah tidak perlu lagi mendapatkan dana

M. Rizki, 2019

*ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Tahun 2008-2017)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

perimbangan. Dana perimbangan masih tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah.

Menurut Halim (2001 : 167) Ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu pertama adalah kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan kedua yaitu ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Namun pada kenyataannya, sudah belasan tahun sejak otonomi daerah diberlakukan, saat ini kemampuan keuangan beberapa pemerintah daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat. Berikut merupakan data kemampuan keuangan daerah yang terdapat di pulau jawa dari presentase tertinggi sampai terendah:

**Tabel 1. 1**  
**Kemandirian Keuangan Daerah Seluruh Kabupaten di Pulau Jawa**  
**Tahun 2017**

| <b>Rasio</b> | <b>Frekuensi Kabupaten</b> | <b>Pola Hubungan</b> |
|--------------|----------------------------|----------------------|
| 0%-25%       | 35                         | Instruktif           |
| 25-50%       | 41                         | Konsultatif          |
| 50%-75%      | 4                          | Partisipatif         |
| 75%-100%     | 4                          | Delegatif            |

Sumber: Data diolah dari [www.djpk.go.id](http://www.djpk.go.id)

Berdasarkan tabel di atas, kemandirian keuangan daerah memiliki 35 kabupaten dari 84 kabupaten di pulau jawa yang termasuk kedalam kategori rendah sekali dan memiliki pola hubungan instruktif, artinya peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). 41 kabupaten dari total kabupaten di pulau jawa memasuki kategori rendah dan memiliki pola hubungan konsultatif, artinya campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi

daerah. Empat kabupaten dari 84 kabupaten di pulau jawa memasuki kategori sedang dan memiliki pola hubungan partisipatif, artinya peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah. Terakhir, empat kabupaten dari total kabupaten yang ada di pulau jawa memasuki kategori tinggi dan memiliki pola hubungan delegatif, artinya campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

**Tabel 1. 2**  
**Ketergantungan Keuangan Daerah Seluruh Kabupaten di Pulau Jawa**  
**Tahun 2017**

| <b>Rasio</b> | <b>Frekuensi Kabupaten</b> | <b>Kriteria</b> |
|--------------|----------------------------|-----------------|
| 0,00-10,00   | 0                          | Sangat Rendah   |
| 10,01-20,00  | 0                          | Rendah          |
| 20,01-30,00  | 0                          | Sedang          |
| 30,01-40,00  | 3                          | Cukup           |
| 40,01-50,00  | 3                          | Tinggi          |
| >50,00       | 76                         | Sangat Tinggi   |

Sumber: Data diolah dari *www.djpk.go.id*

Jika dilihat dari tabel ketergantungan keuangan daerah di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa tiga kabupaten dari 84 kabupaten yang ada di pulau jawa memasuki kategori cukup, artinya ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat memiliki kriteria yang cukup tergantung pada keuangan pemerintah pusat. Tiga dari 84 kabupaten di pulau jawa memasuki kategori tinggi, artinya pemerintah daerah memiliki ketergantungan keuangan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Terakhir, 76 kabupaten atau 90,48% dari 84 kabupaten yang ada di pulau jawa memasuki kategori sangat tinggi, artinya ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat tergolong sangat tinggi.

**Tabel 1. 3**  
**Desentralisasi Fiskal Seluruh Kabupaten di Pulau Jawa**  
**Tahun 2017**

| <b>Rasio</b> | <b>Frekuensi Kabupaten</b> | <b>Kemampuan Keuangan</b> |
|--------------|----------------------------|---------------------------|
| 00,00–10,00  | 4                          | Sangat Kurang             |
| 10,01–20,00  | 58                         | Kurang                    |
| 20,01–30,00  | 16                         | Cukup                     |
| 30,01–40,00  | 3                          | Sedang                    |
| 40,01–50,00  | 3                          | Baik                      |
| >50,00       | 1                          | Sangat Baik               |

Sumber: Data diolah dari *www.djpk.go.id*

Berdasarkan tabel derajat desentralisasi fiskal di atas, bisa sama-sama kita lihat bahwa empat kabupaten memiliki kemampuan desentralisasi sangat kurang yakni dengan pencapaian rasio nya tidak melebihi dari 10%. Yang berada dikategori kurang dalam hal desentralisasi fiskal terdapat 58 kabupaten dengan rasio tidak lebih dari 20%. 16 kabupaten berada dikategori cukup, tiga kabupaten berada dikategori sedang, tiga kabupaten berada dalam kategori baik, serta satu kabupaten terakhir yang memasuki kategori sangat baik dalam hal melaksanakan desentralisasi fiskal.

**Tabel 1. 4**  
**Efektivitas Keuangan Daerah Seluruh Kabupaten di Pulau Jawa**  
**Tahun 2017**

| <b>Rasio</b> | <b>Frekuensi Kabupaten</b> | <b>Kriteria</b> |
|--------------|----------------------------|-----------------|
| >100%        | 80                         | Sangat Efektif  |
| 90%-100%     | 2                          | Efektif         |
| 80%-90%      | 1                          | Cukup Efektif   |
| 60%-80%      | 1                          | Kurang Efektif  |
| <60%         | 0                          | Tidak Efektif   |

Sumber: Data diolah dari *www.djpk.go.id*

Berdasarkan tabel efektivitas di atas, dapat terlihat bahwa 80 kabupaten dari 84 total kabupaten yang ada di pulau jawa memasuki kriteria sangat efektif. Dua kabupaten memasuki kategori efektif, dan satu kabupaten memasuki kategori cukup efektif, serta yang terakhir satu kabupaten lagi memasuki kategori kurang efektif dalam hal efektivitas keuangan daerahnya.

**Tabel 1. 5**  
**Efisiensi Keuangan Daerah Seluruh Kabupaten di Pulau Jawa**  
**Tahun 2017**

| <b>Rasio</b>    | <b>Frekuensi Kabupaten</b> | <b>Kriteria</b> |
|-----------------|----------------------------|-----------------|
| Di atas 100%    | 34                         | Tidak Efisien   |
| 90%-100%        | 50                         | Kurang Efisien  |
| 80%-90%         | 0                          | Cukup Efisien   |
| 60%-80%         | 0                          | Efisien         |
| Kurang dari 60% | 0                          | Sangat Efisien  |

Sumber: Data diolah dari *www.djpk.go.id*

Tingkat efisiensi pemerintah daerah (kabupaten) yang terdapat pada seluruh kabupaten di pulau jawa menghasilkan 35 kabupaten dari 84 total kabupaten memiliki kriteria tidak efisien yakni mencapai rasio lebih dari 100%. Sisanya termasuk kedalam kriteria kurang efisien dengan rasio 90%-100%. Artinya belanja yang dikeluarkan terlalu banyak untuk mendapatkan pendapatan yang diharapkan.

**Tabel 1. 6**  
**Aktivitas Pembangunan Keuangan Daerah Seluruh Kabupaten**  
**di Pulau Jawa**  
**Tahun 2017**

| <b>Rasio</b> | <b>Frekuensi Kabupaten</b> | <b>Kategori</b> |
|--------------|----------------------------|-----------------|
| 0,00-10,00   | 0                          | Sangat Kurang   |
| 10,01-20,00  | 0                          | Kurang          |
| 20,01-30,00  | 3                          | Cukup           |
| 30,01-40,00  | 38                         | Sedang          |
| 40,01-50,00  | 43                         | Baik            |

Sumber: Data diolah dari *www.djpk.go.id*

Aktivitas yang dilakukan dalam pemerintahan khususnya pemerintah kabupaten seluruhnya condong terhadap belanja rutin yang dikeluarkan daripada belanja untuk pembangunan yang ada di daerahnya itu sendiri, hal tersebut dapat digambarkan bahwa pemerintah setempat masih kurangnya pengalokasian belanja untuk pembangunan di wilayahnya. Akan tetapi dari hasil perhitungan rasio aktivitas pembangunan, tiga kabupaten memasuki kategori cukup, 38 kabupaten memasuki kategori sedang, dan 43 kabupaten dari 84 kabupaten memasuki kategori baik.

Dari keenam tabel di atas, salah satu daerah yang mencerminkan masih sangat tergantungnya suatu Pemerintah daerah terhadap penerimaan yang berasal dari pusat, yaitu Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang berada di Provinsi Banten. Peringkat kemandirian kabupaten pandeglang jika dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di pulau jawa menduduki peringkat 57, artinya kabupaten pandeglang termasuk dalam 50% kabupaten terbawah dari total kabupaten di pulau jawa. Ketergantungan terhadap keuangan pemerintah pusat menduduki peringkat ke 16 dari 84 kabupaten yang ada di pulau jawa. Desentralisasi fiskal pemerintah kabupaten pandeglang menduduki peringkat 49, artinya kabupaten pandeglang termasuk dalam 50% kabupaten terbawah dari total kabupaten di pulau jawa. Lalu mengenai efisiensi keuangan kabupaten pandeglang yang menduduki peringkat sembilan dari 84 kabupaten yang ada di pulau jawa, dibandingkan dengan rasio-rasio sebelumnya bahwa rasio efisiensi ini memiliki peringkat paling parah di kabupaten pandeglang.

Sekup yang lebih kecil dari suatu pulau adalah berada di tingkat provinsi. Dalam kemandirian keuangan daerah di provinsi banten, kabupaten pandeglang berada di urutan paling bawah, artinya pemerintah kabupaten pandeglang masih didominasi oleh pemerintah pusat dalam hal pembiayaan untuk daerahnya sendiri. Lalu ketika berbicara mengenai ketergantungan keuangan daerah, kabupaten pandeglang dikategorikan pemerintah daerah dengan ketergantungan keuangan yang paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di provinsi banten. Derajat desentralisasi fiskal yang diukur menggunakan perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah yang terdapat di kabupaten pandeglang juga memiliki desentralisasi yang kurang dibandingkan dengan kabupaten lain di provinsi banten. Dan efisiensi keuangan pemerintah daerah kabupaten pandeglang memasuki kategori tidak efisien paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di provinsi banten. Bukti yang mendukung pernyataan tersebut akan diuraikan dalam rasio kinerja keuangan Pemerintah daerah sebagai berikut:

**M. Rizki, 2019**

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Tahun 2008-2017)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

**Tabel 1. 7.**  
**Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang**  
**Tahun 2017**

| <b>Rasio Kinerja Keuangan</b>        | <b>Persentase</b> | <b>Keterangan</b> | <b>Presentase Ideal</b> | <b>Keterangan</b> |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Rasio Kemandirian Keuangan Daerah    | 23,56%            | Pola Instruktif   | 75%-100%                | Pola Delegatif    |
| Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah | 66,64%            | Sangat Tinggi     | 0%-10%                  | Sangat Rendah     |
| Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal  | 15,70%            | Kurang            | > 50%                   | Sangat Baik       |
| Rasio Efisiensi                      | 102,92%           | Tidak Efisien     | < 60%                   | Sangat Efisien    |

Sumber: Data Diolah dari *www.djpk.go.id*

Beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Kabupaten Pandeglang adalah:

1. Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah yakni memiliki pola hubungan instruktif, di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
2. Ketergantungan keuangan daerah di Kabupaten Pandeglang sangat tinggi. Apabila rasio ini semakin tinggi maka sebagai salah satu tolak ukur kurangnya kemandirian keuangan pemerintah daerah dan kurangnya

kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan daerahnya.

3. Kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli daerah guna membiayai pembangunan berada di kategori kurang. Artinya pemerintah daerah kurang dalam hal meningkatkan pendapatan asli daerah guna mencapai derajat desentralisasi fiskal yang diharapkan.
4. Perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima terlihat sangat tidak efisien.

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya. Adanya otonomi daerah tersebut mengakibatkan terjadinya desentralisasi sistem pemerintahan pada Kabupaten Pandeglang, karena itu pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah Kabupaten berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Masyarakat atau penduduk sebagai salah satu sumber daya pembangunan yang memegang dua peranan penting dalam pembangunan yaitu sebagai subjek atau perilaku sekaligus sebagai objek pembangunan menginginkan adanya transparansi anggaran keuangan yang ada pada Pemerintah Kabupaten, sehingga masyarakat atau penduduk juga dapat memantau kinerja Pemerintah Kabupaten Pandeglang apakah dapat berjalan dengan baik ataupun tidak berjalan dengan baik.

## **B. Identifikasi Masalah Penelitian**

Menurut Gitosudarmo dan Basri (2002 : 275) Konsep kinerja

keuangan adalah rangkaian aktivitas keuangan pada suatu periode tertentu yang

M. Rizki, 2019

*ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Tahun 2008-2017)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



dilaporkan dalam laporan keuangan diantaranya laporan laba rugi dan neraca. “Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi terutang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi” Bastian (2006 : 274). Permendagri No. 59 Tahun 2007 menyatakan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut merupakan rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah berupa perhitungan APBD.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati (2015 : 63) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2009-2012 menggambarkan kinerja masih sangat rendah sehingga memiliki ketergantungan tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat melalui dana perimbangan dalam melaksanakan otonomi daerah. Lalu Rasio ketergantungan Keuangan Daerahnya menggambarkan kinerja PAD maupun sumber pendapatan daerah lainnya masih sangat tinggi dan belum optimal dalam membiayai aktivitas pembangunan daerah, sehingga daerah masih sangat bergantung dengan adanya subsidi pemerintah melalui Dana Perimbangan. Selanjutnya Rasio Efektivitas sudah efektif. Sedangkan rasio efisiensinya memiliki kecenderungan cukup efisien. Pada Rasio Aktivitas Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir Rasio Aktivitas Kabupaten Rokan Hulu diprioritaskan untuk Belanja Rutin.

Menurut Widodo (2001 : 262) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara

lain: Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman. Menurut Hakim (2018 : 13) Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Menurut Halim (2002 : 176) Derajat desentralisasi fiskal adalah sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberi pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan yang demokratis yang dapat diwujudkan melalui pelimpahan wewenang. Menurut Halim (2002 : 177) Rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. “Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima” Pramita (2015 : 13). “Aktivitas Rasio Aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal” Zuhri dan Soleh (2016 : 193).

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa kondisi pemerintah Daerah yang memperhatikan dengan masyarakat sebagai agen yang mengawasi keberlangsungan roda pemerintahan yang terjadi di Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia. Maka, dengan kondisi tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Tahun 2008-2017)**”.

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah penelitian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
2. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dilihat dari Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
3. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dilihat dari Rasio Desentralisasi Fiskal
4. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dilihat dari Rasio Efektivitas
5. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dilihat dari Rasio Efisiensi
6. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dilihat dari Rasio Aktivitas

### **D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Semua penelitian yang dilaksanakan oleh berbagai pihak pasti mempunyai maksud dan tujuan masing-masing. Apabila melihat perumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka maksud penelitian ini adalah mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang dan dengan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.
2. Menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dilihat dari Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah.

3. Menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dilihat dari Rasio Desentralisasi Fiskal.
4. Menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dilihat dari Rasio Efektivitas.
5. Menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dilihat dari Rasio Efisiensi.
6. Menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dilihat dari Rasio Aktivitas.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan, tentu saja memiliki manfaat yang dapat diambil oleh para pembaca, khususnya oleh peneliti itu sendiri. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemangku kebijakan terkhusus kepada pejabat pemerintah daerah mengenai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang agar dapat menjadi tolok ukur budgeting untuk anggaran dan kegiatan ditahun selanjutnya sehingga mempermudah dalam pengambilan keputusan demi terciptanya *Good Governance*.
2. Bagi peneliti dan akademis diharapkan penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan mengenai berbagai rasio yang diwadahi dengan sebutan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.